

Kinerja Koperasi Unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Anto Subekti¹ Evi Zubaidah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
antosubekti@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : March 28, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The aim of this research is to determine the performance and what factors constrain the performance of Village Unit Cooperatives in carrying out a process or in implementing a performance in the village of Kampung Gabung Makmur, Kerinci Kanan sub-district, Siak regency. This Village Unit Cooperative (KUD) performance program is mandatory for each village to be established and built because the aim is to help and make it easier for local communities in the process of borrowing money. In this way, the KUD program makes it easier for loan services to be able to purchase plantations or land. So that this researcher can find out, analyze and describe the performance of the Kebun Sawit Harapan Village Cooperative Unit in Kampung Gabung Makmur, Kerinci Kanan subdistrict, Siak Regency. The key informants for the research consisted of the Head of KUD Kampung Gabung Makmur, and the informants consisted of the Head of Kampung Gabung Makmur Village, the Management of KUD Kampung Gabung Makmur. However, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and also documentation. The results of this research show that the Performance of the Kebun Sawit Harapan Village Unit Cooperative in Kampung Gabung Makmur, Kerinci Kanan District, Siak Regency has indicators of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability which is the Performance of the Village Unit Cooperative (This KUD).

Keywords: Performance, Village Unit Cooperative (KUD)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja dan apa saja faktor yang menjadi kendala kinerja Koperasi Unit Desa dalam melakukan suatu proses atau dalam melaksanakan suatu kinerja di desa kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak. Program kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) ini memang wajib didirikan dan di bangun bagi setiap desa karena tujuan untuk membantu dan mempermudah masyarakat setempat dalam proses peminjaman uang. Dengan demikian adanya program KUD ini lebih dengan lebih mudahnya untuk jasa pinjaman untuk bisa melakukan sistem pembelian kebun atau juga tanah. Sehingga peneliti ini bisa mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Kinerja Koperasi unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Key-Informan penelitian terdiri dari Ketua KUD Kampung Gabung Makmur, dan Informan terdiri dari Kepala Desa Kampung Gabung Makmur, Pengurus KUD Kampung Gabung Makmur. Namun demikian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Koperasi Unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mana memiliki Indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas yang mana Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD).

Kata Kunci: Kinerja, Koperasi Unit Desa (KUD)

Pendahuluan

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya- sumberdaya organisasi secara benar. Dalam menjalankan administrasi maka di perlukan sebuah organisasi sebagai wadah untuk menjalankan administrasi tersebut, organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan individu dalam satu kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah di ciptakan secara sistematis dan struktural.

Dalam pencapaian sebuah tujuan dalam organisasi di perlukan adanya manajemen, yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

Sebuah organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Hakekat pembangunan merupakan rangkaian kegiatan melakukan perubahan yang di laksanakan secara sengaja, sadar dan terencana untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok orang. Kemajuan yang ingin di capai itu sifatnya multi dimensional dan bentuknya bermacam ragam. Semua usaha itu adalah semata-mata untuk membangun bangsa "nation building" di tengah pesatnya tuntutan perkembangan zaman.

Pemerataan pembangunan merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak kepada sebuah tindak kriminalitas dan perlawanan masyarakat kepada pemerintah yang dapat menyebabkan munculnya bermacam-macam anggapan negatif dan rendahnya martabat serta wibawa pemerintah dimata masyarakat. Karenanya pula pemerintah di tuntutan untuk arif dan bijaksana serta adil melihat dan melakukan sebuah kebijakan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.

Pembangunan bila di lihat dari pemerintahan daerah, dimana daerah di berikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberdayakan potensi yang tersedia. Maka yang menjadi titik sentral pembangunan adalah wilayah Pedesaan, dengan alasan bahwa Desa merupakan lingkup terkecil sebuah negara dengan jumlah begitu banyak pada masalah pembangunan jarang tersentuh secara baik. Padahal Desa merupakan persekutuan masyarakat hukum yang tinggal di suatu wilayah secara integral dengan hidup berpedoman pada kebiasaan adat istiadat dan memiliki banyak potensi yang dapat menunjang kelangsungan hidup berbangsa. Persoalan ini adalah persoalan mendasar dalam sebuah negara jika saja potensi budaya, sumber daya manusia dan potensi alam yang ada tidak tergarap secara baik dari keegoan pemerintah justru akan merugikan negara itu sendiri. Karena tujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan sulit tercapai.

Oleh sebab itu aparaturnya daerah di harapkan di sela-sela menjalankan tugas publik service, development dan decetion making di harapkan dapat melakukan pemberdayaan

pada masyarakat dengan senantiasa memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan (organizing kearning) pada masyarakat.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik. Bagi belanja publik dan pemberdayaan masyarakat salah satu nya di gunakan untuk penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun di Desa ini hanya di bentuk Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan KUD (Koperasi Unit Desa) untuk membantu agar masyarakat sejahtera, adapun kesejahteraan sosial menurut Fridlander (suud, 2006:8).

KUD merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat, listrik Desa , dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka KUD dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan KUD harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Tujuan pendirian KUD antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan KUD. Namun penting disadari bahwa KUD didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian KUD bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan KUD akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten tentang arti penting KUD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian KUD.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya Informasi yang di berikan dari pihak pengelola KUD kepada masyarakat, serta tidak adanya koordinasi antara Kepala Desa dengan pengelola KUD mensosialisasikan kegunaan dari pinjaman dana dari KUD sehingga masyarakat lebih menggunakan jasa

pinjaman tersebut untuk pembelian kebun dan tidak di gunakan untuk jenis usaha lainnya, yang mengakibatkan pelayanan simpan pinjam periode berikutnya terkendala.

2. Belum maksimalnya kinerja KUD dalam menjalankan program KUD, serta belum maksimalnya partisipasi aktif dalam mitra kerjasama sehingga, masih ditemukan indikasi ketidak sesuaian dari target kinerja dengan harapan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Menurut Wibowo, (2014:7) mengatakan manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Agus Dwiyanto (2006:50) Mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan adanya indikator yang secara lebih lanjut di jelaskan sebagai berikut:

a) Produktivitas;

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya di pahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas di rasa terlalu sempit dan kemudian general accounting office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang di harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b) Kualitas Layanan;

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang di terima dari organisasi publik.

c) Responsivitas;

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat Responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah di tunjukan dengan ketidak selarasan anatara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d) Responsibilitas;

Menjelaskan apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e) Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang di pilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena di pilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat di gunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa di lihat dari ukuran internal yang di kembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus di nilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Nawawi dan Martini (1996:73). Menurut Bogdan dan Tailor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan Mukhtar (2013: 28)

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan mengawasi

Hasil dan Pembahasan

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha yang terdiri atau mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat memerlukan KUD (Koperasi Unit Desa) untuk membantu agar masyarakat sejahtera.

Adapun juga koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Yang mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong. KUD juga merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institutional). Tujuan pendirian KUD antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADesa). Menggunakan variable

menurut Agus Dwiyanto (2006:50) dan yang di jadikan indikator dalam penelitian ini ialah Produktivitas, Kualitas layanan, Reponsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

1. Produktivitas

merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

a. Prosedur pengelolaan koperasi

pengelolaan koperasi memiliki definisi sebagai suatu ilmu manajemen yang berfokus dalam ruang lingkup koperasi dengan setiap anggota koperasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak pudin selaku ketua koperasi unit desa (KUD). Mengatakan bahwa :

“Menurut saya kegiatan di dalam organisasi agar dapat terlaksana dengan baik adalah dengan cara memilih ketua organisasi yg berkualitas dan berkompotensi serta membuat program kerja sesuai dengan kualifikasi yg akan kita capai nantinya, dan tidak lupa pula memberi kompensasi atau reward kepada anggota yang memiliki kompetensi tinggi. Tetapi dengan kualitas pelayanannya juga harus tetap di perhatikan di dalam suatu kinerja di KUD.”

Lalu Bapak Pujito selaku kepala desa memberikan tanggapan yang mengarah pada pelaksanaan kinerja kud kampung gabung makmur yang mana bapak pujito juga mengatakan bahwa:

“saya setuju dengan apa yang dikatakan bapak pudin kalau dalam masalah kegiatan organisasi sudah cukup baik, disisi lain juga dalam masalah kinerja KUD nya, menurut saya dan dari pandangan saya itu Alhamdulillah untuk saat ini kinerja dari KUD desa gabung makmur sudah sangat baik, para anggota baik masyarakat yg bergabung sudah memiliki tingkat efisiensi yg cukup optimal. Maka saya pernah menyarankan kepada pengurus juga anggota agar dapat bekerja sama dalam hal menjalankan perintah dan peraturan yang telah di tetapkan oleh KUD.”

Dari jawaban ketua kud dan kepala desa mengenai organisasi dan kinerja kud itu sudah lebih baik dan sudah dilakukan semampu dan sesuai apa yang di tetapkan. Selanjutnya pertanyaan bagaimana cara pengurus menaikan tingkat kesuksesan petani wawancara bersama bapak waluyo selaku pengurus kud bidang bpp mengatakan bahwa:

“yaitu kinerja antar anggota yang baik serta peningkatan pelayanan KUD yang baik serta pertanggung jawaban antar anggota dan pengurus yang baik. Maka dengan begitu dapat di simpulkan pengurus dan anggota sudah menjalin kerja sama yang baik dalam meningkatkan pelayan.”

Selanjutnya saya wawancara dengan bapak Tepu selaku anggota kud di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak:

“iya sudah, karena KUD sudah memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat kampung gabung makmur, Dengan begitu dapat diharapkan kedepannya pelayanan dari kepengurusan dapat di tingkatkan lebih jauh lagi sehingga anggota menjadi lebih nyaman dalam melakukan layanan.

Dengan ini saya bertanya kembali kepada salah satu anggota kud yakni bapak Rohmat:

“kalau menurut saya terhadap Visi dan Misi KUD sudah saya rasakan sebagai masyarakat kampung gabung makmur, yang mana visi dan misi kuda ini hanyalah sekedar isyarat cuman yang terpenting itukan bagi masyarakat itu dampak dari visi dan misi nya yang mana sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai apa yang di harapkan masyarakat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada tanggal 16, 17 dan 18 Januari 2024. bahwa pihak KUD telah melakukan sesuai saran dan juga masukan yang di laksanakan saat rapat anggota tahunan terhadap penyeleksian pemilihan pengurus KUD yang baru, bahwa kepengurusan KUD sudah lebih baik dalam menjalankan kegiatan dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pengurus apabila ada hal yang menyeleweng dari aturan yang telah di tetapkan.

b. Sumber daya pendukung Pelaksanaan program Kinerja Organisasi

Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus di latih dan di kembangkan kemampuannya. Dari gagasan tersebut bagaimana kinerja koperasi unitn desa di kampung gabung makmur. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pudun selaku Ketua KUD Mengatakan bahwa:

“Tindakan yg akan saya ambil yaitu memberi teguran terlebih dahulu apabila anggota tersebut belum jera dan masih mengulang kesalahan yg sama maka akan saya keluarkan SP 1, mungkin jika tidak jera juga maka saya akan mengambil tindakan yang lebih dari itu salah satunya yaitu di pecat atau diberentikan untuk selamnya”

Dari pernyataan ketua koperasi unit desa (KUD) bagaimana kinerja pegawai koperasi unit desa apa bila tidak melakukan kegiatannya secara tidak produktif. Bapak pujito selaku kepala desa kampung gabung makmur mengatakan bahwa:

“Kegiatan penyelenggaraan tahunan itu termasuk program KUD, jadi disini kalau program tahunan ada yg belum berjalan dengan baik maka program tersebut harus di seleksi lagi, biasanya setiap program ada ketua atau penanggung jawab masing-masing, nah di sini penanggung jawabnya harus ikut adil atau harus bertanggung jawab atas pencapaian target program tersebut.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada bapak waluyo selaku pengurus KUD tentang menaikan tingkat kesuksesan petani mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan meningkatkan pelayanan dan kinerja sesuai dengan apa yang di butuhkan para petani. Seperti dari KUD dan pengurus memberikan pupuk nonsubsidi yang lebih terjangkau sehingga hasil panen kedepannya akan menjadi lebih meningkat.”

Selanjutnya pertanyaan bagaimana kegiatan dalam organisasi di koperasi unit desa, wawancara bersama bapak Tepu selaku anggota koperasi unit desa:

“Dengan perlakuan yang mereka berikan kepada setiap anggota yang melaporkan terhadap keluhan yang mereka laporkan, maka dengan begitu anggota dapat merasakan pelayanan yang nyaman dan adil bagi setiap anggotanya.”

Berikutnya pertanyaan pengawasan terhadap kinerja koperasi unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak wawancara bersama bapak Rohmat selaku anggota kud mengatakan bahwa:

“Dengan cara melihat dan bertanya langsung kepada pihak pengurus KUD bagaimana perkembangan laporan tahunan tersebut, sehingga baik dengan cara kinerja langsung di lapangan maupun juga laporan hasil kerja”

Selanjutnya berdasarkan hasil Observasi yang di lakukan pada tanggal 16, 17 dan 18 Januari 2024, bahwa kinerja KUD sudah melaksanakan suatu program yang dilakukan dan sudah dijalankan sesuai kebijakan dan arahan bersama dari hasil rapat anggota tahunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya pendukung atau sumber daya manusia itu sangat penting bagi para pengurus supaya apa yang di harapkan masyarakat dari pihak pengrus tersebut bisa terlaksana dan tersampaikan dengan baik.

Dari pemaparan dua subindikator Produktivitas dalam penelitian kinerja koperasi unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dapat dilihat bahwa produktivitas yang mana masyarakat gabung makmur sudah menjalankan prosedurnya sesuai apa yang sudah di buat dari pihak pengurus KUD supaya para anggota menjalankan prosedur tersebut dengan tertib. Namun dalam pelaksanaan program sumber daya pendukung ini pihak pengurus KUD juga sudah melakukan aktivitasnya sesuai apa yang mereka buat, supaya apa yang diharapkan masyarakat dari pihak pengurus tersebut bisa terlaksana dan tersampaikan dengan baik.

2. Kualitas Layanan

Pengertian kualitas layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.

a. Pelaksanaan Program Kinerja KUD

Program kinerja yaitu sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dicoba untuk dilakukan seseorang dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh, sedangkan kerja dilihat dari sudut manajemen pemanfaatan tenaga untuk mencapai penggunaan tenaga atau kemampuan seseorang agar dapat memperoleh sesuatu serta mencapai hasil yang diinginkan. Dari hasil wawancara bersama bapak Pudir selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Menurut saya kalau mengenai kualitas layanan ini para pengurus KUD akan memeberikan yang terbaik , sebagaimana prosedur pelayanan yang baik itu para

anggota KUD memeberikan dan meningkatkan kualitas SDM, serta meberikan pelayanan yang memiliki kepedulian, kepuasan anggota, dan juga loyalitas pelanggan.”

Pertanyaan apa langkah yang diambil bila ada keluhan dari anggota apabila pengurus melakukan pelayanan yang kurang baik. Wawancara bersama bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Biasanya langkah yang saya lakukan adalah mengadakan rapat atau musyawarah, guna rapat di sini adalah salah satunya mengevaluasi kinerja atau layanan yg seharusnya d peroleh masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham tentang apa-apa saja peraturan dan tingkat pelayanan yang di berikan oleh para pengurus KUD.”

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ketua dan juga kepala desa maka wawancara berlanjut kepada bapak Sugeng Riyadi selaku badan pengawas kud mengatakan bahwa:

“iya sudah puas, karena kinerja sesuai dengan prosedurnya masing-masing dan menjunjung tinggi tanggung jawab, Dengan kami memberikan solusi bagi para petani dalam meningkatkan penyediaan pupuk dan fasilitas pertanian lainnya.”

Selanjutnya wawancara bersama bapak Diwan selaku anggota kud mengatakan bahwa:

“yaitu dengan memberi pengarahan langsung dan memberi contoh yang baik, Anggota mengharapkan tidak adanya tebang pilih terhadap anggota yang memiliki kelebihan dan memberi kesempatan kepada meraka yang ingin mendapatkan perlakuan yang sama dari para setiap pengurus.”

Selanjutnya mengenai pertanyaan apa masih ada pengurus yang membedakan antara anggota yang satu dengan yang lain wawancara bersama bapak Riwan selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“masih, yaitu dengan berkomunikasi langsung agar mengerti dimana kekurangan pelayanan yang belum sempurna agar di sempurnakan supaya masyarakat merasa nyaman.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16, 17, dan 18 Januari 2024, dilihat dari program kinerja pengurus KUD itu sudah cukup baik, yang pihak pengurus sudah melakukannya sesuai apa yang di arahkan dan di sampaikan oleh Ketua KUD tersebut.

b. Penyusunan metode kegiatan program kinerja KUD

Metode kerja pada hakekatnya adalah penjabaran tata cara dan teknik pelaksanaan pekerjaan, merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi. Dari teori tersebut bagaimana cara pengurus dalam merespon keinginan para anggotanya wawancara bersama bapak Pudrin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Kalau itu tentu saya sudah memeberikan saran kepada para pengurus KUD agar meberikan respon yang baik kepada para anggota, artinya apabila kinerja tidak sesuai

dengan keinginan maka pelanggan akan menunjukkan kekecewaan dan sebaliknya apabila sesuai atau melebihi harapan maka akan timbul kepuasan dari para anggota.”

Sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Pudin, peneliti juga menanyakan kepada bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah cukup baik respon pengurus KUD gabung makmur untuk para anggotanya, selain itu juga para anggota sudah cukup puas akan pelayanan di KUD kita. Maka dapat di harapkan kepada pengurus dan anggota dapat menjaga kualitas layanan yang telah di berikan terlebih lagi apa bila dapat di tingkatkan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa tingkat kedisiplinan dalam menjalankan kualitas sudah baik wawancara bersama bapak Sugeng Riyadi selaku badan pengawas KUD mengatakan bahwa:

“Iya sangat agar visi dan misi setiap anggota berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat di harapkan dampak yang positif bagi para anggota dan juga masyarakat setempat.”

Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Diwan selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“Iya karena anggota juga mempunyai hak untuk memberi suaranya, Karena setiap anggota berhak untuk menentukan pilihan mereka masing-masing sehingga di harapkan anggota juga ambil peran dalam pemilihan pengurus KUD selanjutnya, dengan begitu tidak ada kecurangan dalam pemilihan setiap pengurus yang baru.”

Peneliti masih melakukan wawancara bersama bapak Riwan selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“Sangat baik dan juga dilayani dengan baik, maka kalau dalam proses pinjaman uang pengurus KUD juga tidak ada yang namanya berbelit-belit dan juga mempersulit, maka dari itu saya sendiri menilai kalau untuk masalah pelayanan pengurus KUD sudah lebih baik.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16, 17 dan 18 Januari 2024, dapat dilihat bahwa dalam suatu penyusunan kegiatan program kinerja KUD ini pihak pengurus sudah melakukan dan menjalankan program kinerjanya dengan baik dan juga bekerja semampu mereka dengan sebagaimana yang di harapkan para masyarakat.

Dari pemaparan dua subindikator Kualitas Layanan dalam penelitian kinerja koperasi unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dapat di lihat dari program kinerja pengurus kud sudah melakukan dan menjalankan sesuai dengan apa yang diarahkan dan di sampaikan oleh ketua KUD, namun demikian dilihat dari penyusunan metode kegiatan program kinerja KUD bahwa dalam suatu penyusunan kegiatan program kinerja KUD ini yang mana para pengurus sudah bekerja semampu mereka dengan sebagaimana yang di harapkan para masyarakat.

3. Responsivitas

Kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program- program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

a. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah

Ada 5 langkah dalam menyelesaikan masalah dalam organisasi yaitu: mencari akar permasalahan, melakukan diskusi, terbuka terhadap kritik dan saran, menentukan jalan terbaik bagi kesejahteraan bersama, dan melakukan evaluasi. Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Pudin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Respon para pengurus terhadap pengaduan dari masyarakat yaitu menanggapi masukan dari masyarakat, karena kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi atas perbedaan antara harapan awal yang belum sesuai hingga harapan yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat”

Lalu peneliti menanyakan kepada bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Sejauh ini para anggota KUD gabung makmur sudah melaksanakan visi dan misi kinerja dengan baik sesuai SOP. Maka dengan SOP yang ada diharapkan para pengurus dapat melaksanakan tugas dan kinerja mereka dengan lebih baik lagi kedepannya.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama ibu Fitri selaku sekretaris KUD mengatakan bahwa:

“Iya sudah, setiap pengurus harus bertanggung jawab dengan sesuai pekerjaannya atau bidangnya masing-masing. Sehingga para setiap anggota mendapatkan pelayanan yang maksimal dari para pengurus KUD.”

Pertanyaan apa tanggapan atau respon anggota apabila pengurus kud akan di ganti dengan yang baru wawancara bersama bapak Tepu selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan memberi dukungan, pengawasan dan juga masukan atau mengajarkan cara kinerja yang lebih baik lagi, supaya pengurus yang baru bisa menyesuaikan diri dan juga bisa melakukan kerjanya dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan para pengurus lainnya untuk kedepannya”

Lalu peneliti melakukan wawancara bersama bapak Anggit selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“yaitu dengan membuat laporan agar disampaikan kepada pemimpin untuk dilakukan survei dan perbaikan secara bersama, agar jalan yang rusak bisa diperbaiki secara cepat demi kenyamanan para pekerja tersebut, dan dari pihak pengurus KUD pun harus selalu memantau atau mengawasi keadaan tempat atau lokasi para pekerja tersebut.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16, 17 dan 18 Januari 2024. Peneliti melihat di atas yang mana langkah-langkah dalam memecahkan masalah yaitu dengan mendengarkan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin apabila permasalahan sudah terselesaikan maka tidak akan ada konflik lagi antara kedua belah pihak tersebut.

b. Solusi dalam pemecahan masalah

Dalam pemecahan masalah ada beberapa hal yang dapat diambil diantaranya adalah dengan cara memikirkan hubungan baik yang harus di jaga, mencari sumber masalah, sering mendengar dan menyelesaikan secara bersama. Wawancara bersama bapak Pudun selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Saya sendiri merasakan itu Ada, yang mana semua pengaduan baik itu sifatnya positif maupun negatif akan tetap kami tanggap dengan sebaik dan sesopan mungkin, guna untuk meningkatkan kualitas KUD. Agar para anggota kedepannya mendapatkan perlakuan yang baik dari para pengurus yang bekerja.”

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk sejauh taentang kepengurusan sudah banyak perubahan untuk memajukan KUD, misalnya dengan melayani para anggota dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan sepenuhnya. Sehingga para anggota dapat lebih puas dan nyaman dalam pelayanan yang di berikan oleh KUD.”

Selanjutnya pertanyaan bagaimana cara pengurus melayani anggota dengan baik dan sesuai aturan wawancara bersama Ibu Fitri selaku sekretaris KUD mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan menjalankan prosedur dengan baik, Maka setiap pengurus harus menanyakan keluhan kepada setiap anggotanya, maka para pengurus akan mencari jalan keluar atau solusi untuk setiap keluhan yang dilaporkan sehingga anggota mendapatkan jalan keluarnya untuk pertanyaannya masing-masing”

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bapak tepu selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“menurut saya untuk masalah informasi tentang KUD itu memang dibutuhkan juga, tetapi lebih bagusnya menunggu atau mendatangi langsung kantor KUD nya untuk mendapatkan informasi tersebut agar informasi yang di dapat itu cukup jelas atau lebih jelas apabila langsung mendatangi ke kantor KUD dan bertanya langsung kepada pengurus KUD apabila ada informasi terbaru.”

Sejalan dengan yang di sampaikan oleh bapak Tepu selaku anggota anggota KUD peneliti juga menanyakan hal kepda bapak Anggit selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“menurut saya Sudah, karena para pengurus KUD sudah mengerjakan atau melakukan sesuai dengan prosedur kinerja KUD yang telah dibuat dan maka dari itu pihak pengurus KUD harus melakukan prosedur kinerjanya dengan sebaik-baiknya dan harus sesuai dengan apa yang di buat.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18 Januari 2024, pihak pengurus dalam memecahan suatu masalah yang timbul dari pihak pengurus cara mengatasinya yaitu dengan mangadakan rapat sesama pengurus dan mendiskusikan permasalahan yang timbul tersebut dan membicarakan masalah tersebut supaya bisa terselaikan dengan baik.

Dari pemaparan dua subindikator Responsivitas dalam penelitian kinerja koperasi unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dilihat dari langkah dalam memecahkan masalah ini yaitu salah satu caranya mendengarkan permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak supaya permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan kepala dingin dan juga agar tidak ada lagi konflik antara kedua belah pihak tersebut. Namun demikian yang mana solusi dalam pemecahan masalah yaitu para pengurus harus mendiskusikan dan membicarakan permasalahan yang timbul supaya dapat terselesaikan dengan baik.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

a. Kualitas usaha penyelenggaraan program kinerja KUD

Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.. wawancara bersama bapak Pudim selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk d KUD kebun sawit harapan sudah semaksimal mungkin untuk pelayanan agar tidak mengecewakan para anggota. Tetapi saya tidak lepas dalam melakukan pengawasan terhadap setiap para pengurus KUD dalam memberikan pelayanan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Respon saya yaa Alhamdulillah , karena simpan pinjam untuk para anggota KUD adalah program yang keuntungannya sangat besar nantinya. Dengan begitu di harapkan para pengurus tidak memberatkan para anggota untuk melakukan simpan pinjam sebagai program yang diadakan oleh KUD.”

Sejalan dengan yang di katakana oleh bapak Pudim dan bapak Pujito peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Miswandi selaku bendahara KUD mengatakan bahwa:

“dengan cara merekap dan mendata ulang untuk perbaikan dan siap untuk bertanggung jawab pada pengurus yang bertugas dalam melakukan pembukuan data tahunan KUD. Sehingga yang mereka kerjakan dapat di pertanggung jawabkan kedepannya.”

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana anggota bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan, wawancara dengan bapak Diwan selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“yaitu dengan bekerjasama dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan prosedur dan melayani masyarakat dengan baik”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rohmat selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“iya sudah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, karena setiap pengurus KUD sudah melakukan dan menjalankan tugasnya dengan baik dan seoptimal mungkin agar setiap anggota yang menginginkan pelayanan dapat terealisasi dengan baik. ”

Selanjutnya berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18 Januari 2024, bahwa kualitas usaha terhadap penyelenggaraan kinerja KUD tersebut sudah terselenggara atau berjalan sesuai program kinerja kud dan juga mendapat keuntungan yang dibutuhkan oleh para anggota atau masyarakat setempat. Dengan memudahkan pinjaman untuk masyarakat maka keuntungan yang didapat juga bervariasi mulai dari barang kebutuhan pokok dan juga barang elektronik.

b. Seberapa banyak usaha dalam KUD

Usaha yang ada di dalam koperasi unit desa di kampung gabung makmur ada beberapa yaitu unit simpan pinjam dan unit dagang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Pudin selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Respon para pengurus terhadap pengaduan dari masyarakat yaitu menanggapi masukan dari masyarakat, karna kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi atas perbedaan antara harapan awal yg belum sesuai hingga harapan yang benar-benar di inginkan oleh masyarakat”

Peneliti melanjutkan wawancara bersama bapak Pujito selaku kepala desa yang mana mengatakan bahwa:

“Ya sejauh ini pelayanan pengurus KUD terhadap para anggotanya sudah cukup baik, dan begitu pula respon para pengurus dan anggotanya. Oleh karena itu di harapkan pada setiap pengurus agar menjaga etika mereka dalam memberikan pelayanan pada anggotanya.namun demikian dalam masalah unit simpan pinjam dan juga unit dagang itu menurut saya dalam unit simpan pinjam ini para pengurus harus bekerja dengan teliti dan juga jeli terhadap keuangan karena apabila ada salah dalam proses simpan pinjam bisa saja masyarakat menuntut dengan ketidakpuasan mereka,tetapi dalam unit dagang itu menurut saya harus di tingkatkan lagi mungkin itu untuk menambah barang penjualan salah satunya seperti peralatan untuk memanen sawit yaitu egrek atau pun juga mesin pemotong rumput supaya lebih memudahkan masyarakat untuk membeli barang tersebut. ”

Peneliti melanjutkan wawancara bersama bapak miswandi dengan jabatan bendahara Koperasi Unit Desa (KUD)

“Iya sudah jelas mau karena semua dana simpan maupun pinjam harus sesuai dengan data. Sehingga dapat bagi para pengurus untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah di kerjakan dalam pembukuan simpan dan pijam para anggota. Namun demikian sesuai dengan arahan bapak pujito yang mana masalah unit dagang juga harus perlu di perhatikan dan apa saja yang kurang sehingga bisa dan dapat di lengkapi dari apa yang masih kurang tersebut”

Peneliti masih melakukan wawancara bersama Bapak Diwan selaku anggota KUD mengenai Responsibilitas KUD:

“Menurut saya sendiri kalau masalah respon para pengurus terhadap anggota itu sudah cukup baik dan juga memuaskan, sehingga cara respon para pengurus terhadap

anggota itu bagi saya sudah benar-benar bertanggung jawab, dan bagi saya cara pengurus melayani anggotanya tersebut cukup ramah, sopan dan juga tidak lalai. Dalam hal unit dagang menurut saya itu juga harus di tingkatkan lagi dalam penjualan peralatan supaya bisa memudahkan para masyarakat dalam membeli peralatan yang di butuhkan tersebut.”

Peneliti masih melakukan wawancara dengan Bapak Rohmat selaku anggota KUD mengenai Responsibilitas KUD:

“Sangat besar karena kinerja yang baik sudah di berikan dan di rasakan oleh masyarakat, sehingga belum terdapat pengaduan atau penilaian yang negative dari para anggota terhadap pengurus KUD, dan untuk sejauh dan hingga saat ini para anggota masih meberikan nilai yang positif terhadap pengurus KUD dalam masalah simpan pinjam tersebut. Dalam masalah unit dagang saya setuju apa yang di katakana bapak pujito dan bapak diwan para pengurus harus memperbanyak penjualan pelaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18 Januari 2024, masih ada beberapa penjualan atau pemasukan penjualan barang atau peralatan yang harus di lengkapi dan di tambah lagi dari pihak pengurus KUD sehingga bisa mempermudah anggota untuk mendapatkan peralatan tersebut.

Dari pemaparan dua subindikator Responsibilitas dalam penelitian kinerja koperasi unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupetan siak di sini dapat dilihat bahwa dalam kualitas usaha terhadap penyelenggaraan kinerja KUD sudah berjalan sesuai program kinerja dan juga mendapat keuntungan yang di butuhkan oleh para anggota atau masyarakat setempat. Dengan demikian sebagaimana dilihat dari seberapa banyak usaha yang ada dalam KUD tersebut masih terdapat beberapa penjualan barang atau peralatan yang perlu di lengkapi dan di tambah lagi oleh pihak pengurus, tujuannya untuk mempermudah para anggota mendapatkan barang atau peralatan tersebut.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang di pilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena di pilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat di gunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

a. Dampak Terhadap Pemerintah

Dampak yang dirasakan oleh pemerintah ialah mendapat pemasokan atau pengeluaran dalam hal barang dan jasa sehingga pemerintah mendapat keuntungan yang lebih, karena tingkat kebutuhan yang di minta oleh pihak organisasi seperti kud melonjak. peneliti juga melakukan wawancara terhadap bapak Pudir selaku ketua KUD mengatakan bahwa:

“Pertentangan bisa saja terjadi, kapan dan dimana saja. Biasanya yang saya temukan pertentangan tentang perbedaan pendapat antara individu dengan individu, individu

dengan kelompok dan sebaliknya. Tapi semua pertentangan itu tidak berlangsung lama, biasanya ada salah satu anggota yg melerainya, ataupun dengan musyawarah bersama, dengan begitu pemerintah desa harus melakukan tindakan sesuatu seperti mengadakan rapat bersama pengeurus KUD supaya bisa menegtahui dan menyelesaikan suatu permasalahan dan juga dampak yang dihadapi tersebut.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Pujito selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Sejauh ini pengawasan saya terhadap kinerja KUD gabung makmur berjalan karena sejauh ini belum ada problem yang cukup serius. Dan belum ada pengaduan dari para anggota yang melaporkan bahwa anggota tidak mendapat pelayanan yang baik dari para pengurus KUD.jadi apabila dampak tersebut muncul dan terdengar dari pihak pemerintah desa dalam pelayanan pengrusu KUD kurang puas bagi masyarakat maka saya sebagai kepala desa akan turun tangan langsung menegur dan memberi saran yang baik untuk para pengurus tersebut. ”

Peneliti masih melakukan wawancara bersama Ibu Fitri selaku sekretaris KUD mengatakan bahwa:

“iya harus di tegur dan di buktikan bila ada ketidak jujuran karena setiap kegiatan harus ada bukti di pembukuan KUD. Maka dengan itu selaku anggota juga harus mencatat simpan dan pinjaman apabila terdapat kekeliruan dalam pembukuan yang di lakukan pengurus bisa di pertanggung jawabkan. Dengan begitu apabila terdapat dampak yang kurang puas bagi masyarakat maka pihak pengurus KUD akan melakukan diskusi bersama para pengurus supaya dapat menemukan solusi yang baik tentang dampak yang di rasakan para anggota.”

Peneliti masih melakukan wawancara dengan Bapak Diwan mengenai Akuntabilitas KUD mengatakan bahwa:

“iya sudah, karena bekerja sesuai dengan prosedur dan bila ada kekurangan dapat di perbarui dengan baik lagi, maka dengan adanya perbaruan kinerja target yang di capai tersebut akan lebih mudah di selesaikan dalam setiap organisasi tersebut,untuk saat ini dampak yang kami rasakan dari pemerintah KUD itu belum ada kalaupun ada kami sebagai anggota atau masyarakat biasa aja pasti langsung komplain kepada pihak pengurus langsung. ”

Peneliti masih melakukan wawancara dengan Bapak Riwan mengenai Akuntabilitas KUD.

“iya siap memberikan sanksi karena setiap ketua mempunyai wewenang untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua, itulah guna di bentuk seorang ketua untuk mengawasi kinerja para setiap anggotanya, dan apabila terdapat salah satu anggotanya membuat kesalahan maka ketua siap memberikan sanski atau hukuman teguran bagi anggota agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Setuju dengan tanggapan bapak diwan mengenai dampak yang datang dari pemerintah KUD anggota harus langsung Komplain ke pihak KUD bukan malah didiamkan hal tersebut.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18 Januari 2024, dampak yang masih terdapat di pemerintah desa atau KUD ini seharusnya pihak KUD membuka atau menyediakan lagi lapangan pekerjaan bagi para anggota.

b. Dampak Terhadap Masyarakat.

Kinerja koperasi yang baik memberi suatu dampak terhadap kesejahteraan anggota koperasi yang dapat dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Wawancara dengan bapak Pudir mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini Alhamdulillah organisasi kami sudah sangat membantu program-program di KUD, dan salah satu dampak positifnya adalah kesejahteraan para anggota, Dan program yang kami keluarkan ialah program pembelian sembako yang cukup terjangkau dari yang ada di pasaran.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama bapak Pujito selaku kepala tentang akuntabilitas desa mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini Alhamdulillah organisasi kami sudah sangat membantu program-program di KUD, dan salah satu dampak positifnya adalah kesejahteraan para anggota, Dan program yang kami keluarkan ialah program pembelian sembako yang cukup terjangkau dari yang ada di pasaran.”

Peneliti menanyakan sanksi apa yang di berikan kepada anggota yang kedapatan tidak jujur,wawancara bersama ibu Fitri selaku sekretaris KUD tentang akuntabilitas mengatakan bahwa:

“yaitu dengan menegur langsung bila tidak bisa di pertanggung jawabkan maka sanksi di berikan dari pengurus KUD, Dengan begitu pengurus di berhentikan dari pekerjaannya karena melakukan tindakan yang kurang baik terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya.”

Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Diwan selaku anggota KUD tentang akuntabilitas kepengurusan mengatakan bahwa:

“Iya ada yaitu untuk mendisiplinkan agar keperluan barang dan alat tetap terjaga dengan baik, maka dari itu apabila ada anggota yang kekurangan peralatan atau barang yang dibutuhkan situ juga para anggota siap melakukan pemberian barang atau peralatan yang dibutuhkan anggota, supaya para anggota puas dengan pelayanan dan juga cara kinerja kami.”

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana cara pandang bapak dalam menilai kinerja pengurus kud wawancara bersama bapak Riwan selaku anggota KUD mengatakan bahwa:

“Yaitu dengan cara bagaimana para pengurus dalam melayani Anggota (masyarakat) dengan tugas para anggota masing-masing dengan tanggung jawab yang sudah di berikan oleh pihak ketua KUD.”

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 16,17 dan 18 Januari 2024, dampak yang di rasakan masyarakat itu memang ada yaitu salah satunya

masyarakat berharap pihak pengurus KUD memberi kemudahan kepada para anggota terhadap pelayanan.

Dari pemaparan dua subindikator Akuntabilitas dalam penelitian kinerja koperasi unit desa di kampung gabung makmur kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dapat dilihat bahwa Dari wawancara diatas bersama Bapak Pudir Selaku Ketua KUD bahwasannya dalam sistem kinerja di KUD perlu di tingkatkan lagi, supaya kinerja para pengurus KUD dapat di pandang atau dinilai positif dari para masyarakat setempat, dan juga seharusnya pihak KUD harus membuka dan juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk para anggota.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kinerja Koperasi Unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Produktivitas dalam segi kinerja KUD di Kampung Gabung makmur sudah seadanya berjalan dengan baik, yang mana para pengurus KUD sudah menjalankan tugasnya dengan penuh sungguh-sungguh dan juga tanggung jawab sesuai apa yang di arahkan.
- b. Kualitas Layanan ini yang mana para pengurus KUD dalam segi pelayanan sudah cukup bagus dan juga sopan sehingga membuat para anggota menjadi puas dalam segi layanan dari pengurus KUD tersebut.
- c. Responsivitas yang mana dari jawaban anggota tersebut dalam system responsivitas pengurus itu sudah puas bagi anggota sehingga dalam proses pinjam meminjam itu cepat dan juga tidak berbelit-belit.
- d. Responsibilitas ini untuk saat ini para pengurus KUD dalam segi proses pinjaman uang untuk anggota selalu berjalan dengan baik, belum terdapat kendala, tetapi apabila anggota merasa ada yang tidak puas dalam proses pinjaman uang para pengurus siap melakukan yang terbaik untuk anggota.
- e. Akuntabilitas yang mana dalam sistem melakukan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh ketua KUD maka para pengurus harus bekerja dengan baik dan jujur dalam melakukan hal tersebut, agar tidak ada kecurangan dalam mengerjakan sesuatu, apabila dari pengurus didapatkan tidak jujur maka ketua KUD akan memberi sanksi atau tindakan yang pantas seperti memberi SP1.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan memberikan dan memaparkan beberapa saran yang sifatnya membangun. Dan adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Harusnya para pengurus KUD lebih memperhatikan lagi dan selalu memberikan informasi kepada setiap para anggota supaya bisa memberikan yang terbaik untuk para anggota dan memberikan kenyamanan para anggota saat melakukan pinjaman uang.
2. Seharusnya para anggota juga saling ikut bekerja sama dalam setiap informasi yang diberikan, yang mana dalam hal ini di tuntut peran anggota untuk ikut ambil andil

dalam menjalankan program yang telah ditetapkan oleh KUD, sehingga pengurus juga dapat bekerja lebih baik untuk kedepannya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Leo, Agustino. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Badan Penerbit FISIPOL. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru : UIR
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Brantakusumah, D. S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogია, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota. Faturrahman, & Masriadi. 2010. Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik. Mahakarya Rangkang.
- Handoko TH. 1992. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Libberty, Yogyakarta.
- Kusdyah,Ike. 2007. Manajemen Sumberdaya Manusia, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.
- Hartik,Indah Puji. 2014. Buku Praktis Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM), Laksana, Jogjakarta.
- Munandar,Jono.2014. Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi, IPB, Bogor
- Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta : Salemba Empat.
- Manullang. 2006. Manajemen Personalia, Gadjah Mada University Press, Medan Moekijat. 2005. Pengembangan organisasi. Cetakan Ketujuh, Bandung, Mandar Maju
- Press Saparin, sumber. 1986. Tata pemerintahan dan adminitrasi pemerintahan desa. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Robbins, Stephen P. And Timothy A. Judge. 2011. Organizational Behavior, New Jersey, Pearson Education, Inc.